

SKRIPSI

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA
MERE KEHE KECAMATAN KODI BANGEDO KABUPATEN SUMBA
BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dlajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

EKSON KAKA

NIM.2019B1D024

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMAHDIYAH MATARAM
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA
MERE KEHE KECAMATAN KODI BANGEDO KABUPATEN SUMBA
BARAT DAYA PROPENSI NUSA TENGGARA TIMUR**



Disusun dan di ajukan oleh:

EKSON KAKA
NIM. 2019B1D024

Pembimbing I,

Dr. SITI ATIKA RAHMI, S.Sos., M. Si
NIDN. 0815118302

Pembimbing II,

RIDWAN, S.IP.,MM
NIDN. 0808119102

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Yudhi Lestana, S.IP.,M.IP
NIDN. 0827118801

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA MERE
KEHE KECAMATAN KODI BANGEDO KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh:

EKSON KAKA
NIM: 2019B1D024

Telah diuji oleh tim penguji pada tanggal:
Mataram, 29 Maret 2023

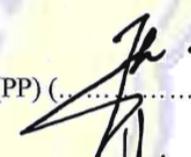
Telah dinyatakan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar serjana
(S1) di program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas muhammadiyah mataram.

Tim penguji:

1. **Dr.Siti Atika Rahmi, S.Sos.,M. Si**
NIDN. 0815118302

(PU) ()

2. **Ridwan, S.IP.,MM**
NIDN.0808119102

(PP) ()

3. **Drs. Amil, MM**
NIDN.0831126204

(PN) ()

mengetahui.

Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas muhammadiyah mataram
Dekan.



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.

NIDN. 0806066801

PERYATAAN KEAHLIAN KARYAILMIAH.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ekson Kaka
Nim : 2019B1D024
Program studi : Ilmu Pemerintahan

Saya menyatakan bahwa dalam tulisan karya ilmiah ini benar-benar penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau tulis orang lain. kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Mataram, 29 Maret 2023

Yang menyatakan



Ekson Kaka
Nim.2019B1D024



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eksan Kaka
 NIM : 2019B1D024
 Tempat/Tgl Lahir : Makonda, 06-07-1998
 Program Studi : Ilmu Pematintahern
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 No. Hp : 087 249 915 532
 Email : eksankaka19@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pembinaan badan usaha milik dasar (BUMDAS) di desa maki kaka kaka mentan kab. Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 38%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 2023/11/04.....2023

Penulis



Eksan Kaka
 NIM. 2019B1D024

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Askandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elson Kaka
 NIM : 2019B1D024
 Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 06-07-1998
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 No. Hp/Email : 082 8409 915 582
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Pengelolaan bendaharawan milik jasa (BEMDAS) di sks-
maka kebu kacamantan kod. bangor kebu paku sube
bebet de-ya NTT

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 5/11/2023
Penulis



Elson Kaka
NIM. 2019B1D024

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**Ora Et Labora.
St. Benediktus dari Nursia.**

Mazmur 119-105, Firman-mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.

Lukas 17-10 demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang di tugaskan kepadamu , hedaklah kamu berkata: kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna ; kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.”



HALAMAN PERSEMBAHAN.

Segala Puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada bapa tercinta Beni Diktus, dan mama tercinta Sosefa Karere, karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah selalu menjaga saya dalam doa-doa, karena doa-doa kalian yang paling berharga dalam hidup saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih Bapak tercinta dan Mamaku tercinta
2. Kepada saudara-saudara tercinta, Abang Hani, Abang Ayup, Adi Rio, Adi Eni dan Adi Adiku yang masih kecil yang selalu mendukung dalam doa, maupun materi, pikiran yang tidak ada hentinya. Terima kasih banyak semuanya.
3. Kedua keluarga besar dari Papa, Mama yang selalu mendukung dalam doa. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya.
4. Kepada dosen pembimbing saya Ibu Atika, Pak Ridwan, terima kasih banyak atas bimbingan dan ilmu yang di berikan kepada saya.
5. Seluruh teman-teman angkatan dari ilmu sosial dan ilmu politik yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan memberikan motivasi yang tidak ada hentinya.
6. Kepada saudara-saudariku yang ada di Mataram, Minggu, Anis, Ferdi, Yuli, Kori, Albina yang selalu mendukung dalam doa, semangat buat saya. Terima kasih banyak saudara-saudariku atas doa dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mere Kehe Kecamatan Kodi Bagedo Kabupaten Sumba Barat Daya NNT.”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada.

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M,Si Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP Sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M. Si Sebagai Pembimbing Pertama yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Sripsi ini dengan baik.
5. Bapak Ridwan, S.IP., MM Sebagai Pembimbing Kedua yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dan saran-saran,arahan dalam teknik penulisan Sripsi ini.

6. Kedua Orang Tua Tercinta, dan semua pihak Yang Tidak Dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan dan doa dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi Ini Masih Jauh Dari Kata Sempurna. Penulis Mengharapkan Saran Dan Kritikan Untuk Membangun Demi Meningkatkan Pengetahuan Dan Kemampuan Penulis Di Kemudian Hari.

Mataram, 29 Maret 2023
Penulis,

EKSON KAKA
NIM. 2019B1D024



ABSTRAK

***PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA MERE KEHE
KECAMATAN KODI BANGEDO KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR***

Oleh :

**EKSON KAKA
NIM. 2019B1D024**

Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manghu Boko Desa Mere Kehe Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan Jenis penelitian menggunakan deskriptif Pendekatan kualitatif. Sumber data adalah data primer, data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Mere Kehe Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat daya. Adalah merupakan instrument pemberdayaan ekonomi local dan kapisitas desa yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan BUMDes Manghu Boko adalah Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mekanisme kernerja BUMDes, tidak adanya transparan antara pemerintah dan masyarakat, dari sisi dana. Kesimpulan, **Pertama:** Dalam pengelolaan BUMDes Magho Boko Desa Mere Kehe Belum berjalan baik dan belum bisa dikatakan Berhasil. Karena Persoalan Dana Dan Sumber daya yang Belum Maksimal. **Kedua:** Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan BUMDes Manghu Boko adalah Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mekanisme kernerja BUMDes, Sumber daya manusia yang masih minim.

Kata Kunci : Pengelolaan, (BUMDes).

**THE VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDes) MANAGEMENT IN
MERE KEHE VILLAGE, KODI BANGEDO, SOUTHWEST SUMBA
DISTRICT,
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE**

By:
EKSON KAKA
NIM. 2019B1D024

ABSTRACT

The purpose of this study is to discover how village-owned enterprises (BUMDes) are managed and what factors influence the management of BUMDes in Manghu Boko, Mere Kehe Village, Kodi Bangedo, Southwest Sumba Regency. A descriptive qualitative approach is used in this type of research. Primary and secondary data sources are used. The findings of this study indicate that the Management of Village Owned Enterprises in Mere Kehe Village, Kodi Bangedo, Southwest Sumba Regency is a tool for empowering the local economy and village capacity, with the goal of increasing the village's original income and the village community's welfare. The lack of public awareness of the operating mechanism of BUMDes, as well as the lack of openness between the government and the community in terms of funding is variables that influence the successful management of Manghu Boko BUMDes. First, the management of BUMDes Maghu Boko, Mere Kehe Village has not gone well and cannot be considered successful, because of the issue of underutilized finances and resources. Second, variables influencing the successful management of BUMDes Manghu Boko include a lack of public understanding of the operating mechanism of BUMDes and a lack of human resources.

Keywords: *Management, BUMDes.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

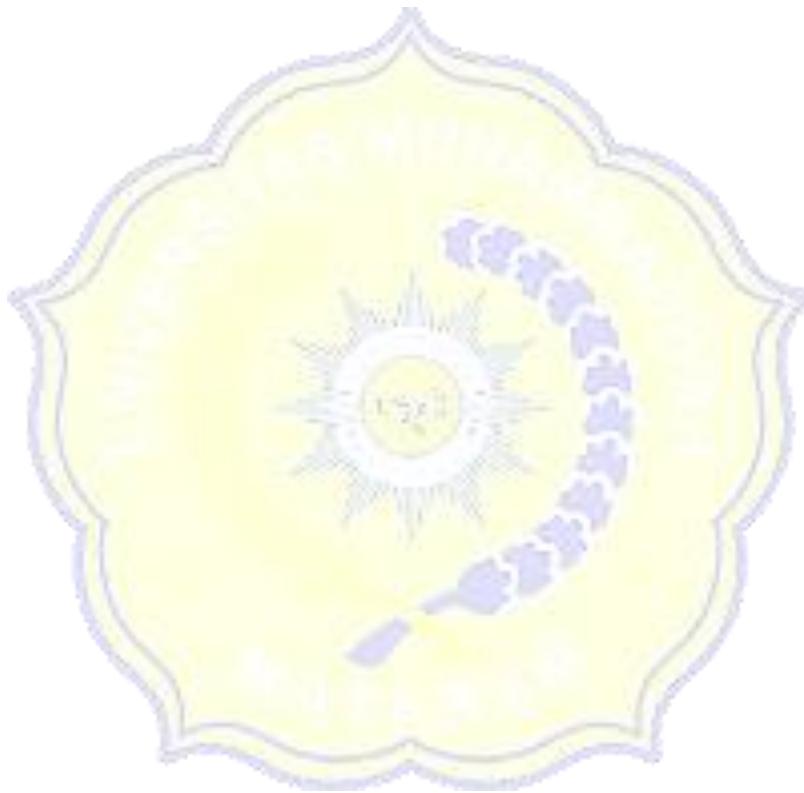
COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Landasan Teori	16
2.3. Kerangka Pikir.....	37
2.5. Deskripsi Fokus.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Metode Penelitian.	40
3.2. Jenis penelitian	40
3.3. Lokasi dan waktu Penelitian.....	41

3.4.	Jenis dan Sumber Data.	41
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.	42
3.7.	Motode Analisis Data.	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Gambaran Umum Lokasi Peneletian.	45
4.1.2	Letak Geografis Desa Mere Kehe.....	45
4.1.3	Demografis desa.....	45
4.1.4	Keadaan sosia budaya.....	46
4.2	Profil BUMDes Desa Mere Kehe	46
4.3	Hasil penelitian.....	60
BAB V PENUTUP		68
5.1	Kesimpulan.	68
5.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN.....		73



DAFTAR TABEL

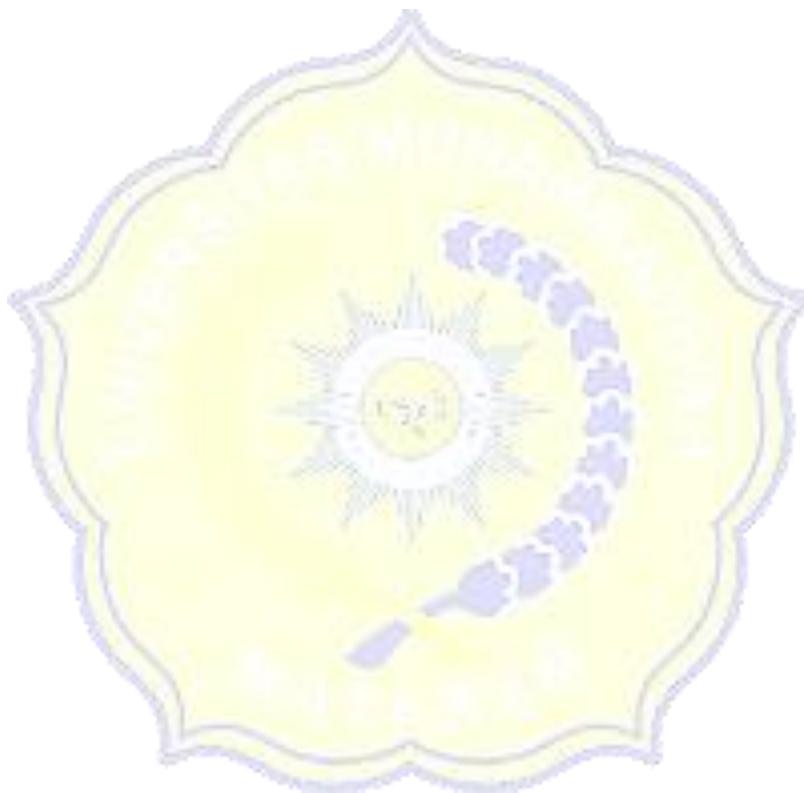
Tabel 3. 1Tabel 3.1 teknik informan peneletian	42
Tabel 4. 1Tabel 4.2 Penyertaan Modal BUMDes	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambar 2.4 kerangka piker.....38

gambar 4. 1 Gambar 4.2 Struktur Pengurus BUMDes Desa Mere Kehe.50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permendes Nomer 4 Tahun 2015 tentang pembentukan, pengelolaan serta pengurusan Badan Usaha Milik Desa, serta menjadi pendoman dibebagai daerah. maupun desa didalam pembentukan kepengurusan BUMDes. Diketahui bahwa BUMDes sebagai Usaha yang dimiliki desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa adalah bentuk penguatan kelembagaan ekonomi desa sekaligus sebagai alat pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. merupakan mesin ekonomi dipemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Metri Desa, Pembangunan Daerah Tirtinggal, dan Trasmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar Mengatakan bahwa ditahun 2021 jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan mencapai 57.273. Dan datarinciannya 45.233 BUMDes yang aktif serta 12.040 BUMDes yang tidak aktif. Di antara yang aktif tersebut, sebanyak 15.768 Bumdes atau 35%, berdampak Pandemi. Adapun data dari kementerian Desa, tercatat sebanyak 1.022 BUMDes yang telah berkebang di seluruh indonesi,yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 kecamatan dan 1.022 Desa.kepemilikan bumdes tebanyak berada di jawa timur dengan 287 BUMDes, kemudian Sumatra Utara degan 173 BUMDes.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengawasi pelayanan

masyarakat untuk pembangunan ekonomi, dan pengelolaan keuangan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih serta memiliki tugas untuk mengelola perekonomian, pembangunan, dan pelayanan dalam rakyat agar dapat melaksanakan pemerintahan yang bertanggung jawab (Setyaningrum, 2012).

Pemerintahan Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pelengkap Undang-Undang No.12 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom. Pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah menurut asas otonomi. Serta UU No.33 tahun 2014 sebagai perubahan dan penyempurnaan UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah (Abdul, 2016)

Adapun penulis menemukan peneliti terdahulu yang di mana Wahyu Sumarsono (2018) meneliti tentang Strategi Pendirian dan Pengelolaan BUMDES Amarta dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat di Pandowoharjo Sleman Yogyakarta. Teori Chandler dalam pemikiran Supriyono yang berpedapat bahwa, strategi merupakan sebuah penentuan dasar tujuan jangka panjang dan tujuan pemberdayaan masyarakat serta pemakaian cara-cara bertindak dan alokasih sumber daya manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, strategi pendirian dan pengelolaan BUMDes Amarta dalam penguatan ekonomi masyarakat yaitu sosialisasi dan pembelajaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan mengundang berbagai elemen masyarakat desa dengan tujuan mendorong desa untuk membentuk BUMDes agar aset yang dimiliki oleh desa mampu dikelola dan dikembangkan secara lebih baik dan profesional.

Adapun Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu diatas dimana, Wahyu Sumarsono membahas Tentang strategi Pendirian dan Pengelolaan BUMDES Amarta dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat di Pandowoharjo Sleman Yogyakarta, dengan focus penelitiannya di Pandowoharjo Sleman Yogyakarta. Sedangkan penelitian penulis focus ke pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Mere Kehe Kecamatan Kodi Bengedo Kabupaten Sumba Barat Daya

Kajian Tiori Agar penulis ini Lebih terarah dan tepat sasaran, penulis perlu menggunakan kajian teori landasan-landasan utama untuk mendapatkan konsep yang tepat dan benar dalam menyusun Skripsi.

1. Konsep Manejemen

Mannejemen adalah seni dan kemampuan memperoleh hasil yang ditentukan sebelumnya dari orang lain. Georgi Terry dalam Inu Kencana menyatakan bahwa proses khusus yang terdiri dari perencanaan, penggorganisasian, pelaksanaan, dan pengwasan dilakukan untuk menentukan dan mencapai apa yang di lakukan melalui pemanfaatan sumber lain. John D. Millet dalam (Syafiie, 2013).

2. Konsep Badan Usaha milik desa (BUMDes).

Pengelolaan Badan usaha milik desa Merupakan Tempat usaha milik desa dan dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah desa untuk berupaya memperkuat ekonomi desa yang di bentuk berdasarkan potensi keperluan desa merupakan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Terhadap pemerintah Daerah yang dibentuk lain, dalam Rangka Pengembangan pendapatan asli desa.(Asvi, 2017)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola oleh Pemerinta Desa dan bekerja sama dengan masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini termasuk masyarakat yang ingin dapat bersinergi mengikutsertakan bekerja sama yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.setiap desa yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang berjalan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada didesa tersebut. (Bumdes et al., 2020) menjelaska bahwa Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen pemberdayaan perekonomian lokal serta berbagai ragam jenis sesuai dengan kemampuan desa. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Selain itu, BUMDes memiliki efek peningkatan pendapatan asli desa (PAD) yang mampu memungkinkan desa untuk melakukan pembangunan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat. (Febri, 2020)

(Ibrahim, 2018) dalam bukunya disebutkan bahwa keberadaan BUMDes merupakan upaya untuk menampung semua kegiatan dibidang

ekonomi dan pelayanan publik yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai penghubung masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa. Sesuai aturan Pemerintah Nomer 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, diterbitkan Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 117 serta Pasal 185 Huruf b Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. BUMDes didirikan antara lain dalam rangka meningkatkan pendapatan awal desa. Keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang berpotensi mengubah hasil kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan dan kinerja BUMDes harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dan dibina oleh pemerintah desa yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan bekerja sama dengan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tumbuh sebagai bentuk strategi yang digunakan masyarakat dan pemerintah desa untuk berusaha meningkatkan perekonomian desa dengan mengelola potensi yang dimiliki.

Berdasarkan otonomi daerah, pemerintah desa membentuk dan mengawasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui peraturan desa yang dipengaruhi oleh peraturan daerah. Dalam operasionalnya, BUMDes mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat melalui lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional oleh manajemen.

Melalui musyawarah desa dikaji kondisi ekonomi dan budaya masyarakat dalam rangka pembentukan BUMDes. BUMDes dibangun atas

gagasan masyarakat yang dapat menghimpun aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa. Konsekuensinya, prinsip partisipasi, transparansi, dan koperasi mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah desa Mere kehe mendirikan BUMDes Manghu Boko Pada tanggal 20 Maret 2019 yang merupakan lembaga usaha desa dan tujuannya untuk mengembakan sumber dayaguna desa, maupun ekonomi masyarakat desa yang sesuai kebutuhan dan potensi desa.dengan modal Anggaran pendapatan dan belanja asli desa (APBD). Sedangkan jenis-jenis usaha BUMDes Manghu Boko desa Mere Kehe sebagai berikut:

1. Bidang usaha barang dan jasa.
2. Bidang simpan pinjam.
3. Suadaya kolam ikan

Perinsip mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Manghu Boko dipekerjakan seutuhnya oleh masyarakat desa mere kehe hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bekerja sama dengan pihak desa maupun unit pembiayaan. Jika lembaga ekonomi kuat yang Berbagai persoalan ekonomi dapat diselesaikan melalui penerapan kebijakan yang sehat, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan aset kepada masyarakat.yang ada di desa (Ajiz, 2019)

Tujuan akhir dari BUMDes adalah sebagai sarana membangun modal sosial yang harus mampu menjembatani sehingga berpenguat perekonomian didesa semakin maju dan meningkat serta berkembang. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa kususnya meningkatkan kesejahteraan perekonomian lingkungan sekitar, khususnya dengan mendirikan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes).

Secara Teknis BUMDes merupakan lembaga yang menunjukkan dan mendorong peningkatan pendapatan awal desa (PAD). Usaha yang dimiliki oleh desa (BUMDes) juga merupakan bentukan dari kelembagaan usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa yang berbasis kebutuhan dan potensi desa. (Irfan Nursetiawan, 2018)

Sebagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan transparan kesadaran akan pentingnya dan fungsi BUMDes serta sosialisasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa memiliki kemampuan untuk mendukung dan membekali masyarakat, memberikan pendidikan dan pelatihan, serta memenuhi kebutuhan BUMDes.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 07 Tahun 2015, tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), disebutkan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mengembangkan pendapatan dan memberikan partisipasi ekonomi bagi pemerintah desa dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa.

(Rachmat, 2014) dalam bukunya manajemen strategis adalah seni dan ilmu yang mempersiapkan, melaksanakan, serta memberikan keputusan silang hak fungsi tujuan atau yang dituju. Mengenai peran manajemen strategis yaitu unsur-unsur yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan atau perencanaan terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen.

Keberhasilan pengelolaan BUMDes dapat dinilai dengan menggunakan indikator khususnya sebagai berikut:

- (1) Perencanaan, adalah yang memikirkan hal-hal yang harus dilakukan dengan sumber daya dimiliki dan ditetapkan prioritas masa depan sehingga mereka bisa beroperasi sesuai dengan tujuan organisasi dan memerlukan suatu kegiatan administratif, mulai dari pendataan, pengolahan data melalui persiapan perencanaan.
- (2) Organisasi adalah kegiatan penyusunan yang meningkatkan komunikasi antar anggota di tempat kerja.
- (3) Pengarahan Suatu kegiatan yang memberikan arah dan petunjuk memastikan bahwa perintah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- (4) evaluasi merupakan prosedur pengawasan yang memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab dilakukan sesuai dengan rencana dan harapan dengan memperhatikan pelaksanaan semua kegiatan organisasi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2016 pasal 1 angka 5 disebutkan bawasannya kekayaan Harta desa dapat diperoleh dari pendapatan desa, dari APBDes atau sumber lain yang sah dalam kekayaan desa, murni usaha desa dan BUMDes serta dapat mengelola untuk di optimalkan hasilnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa yang tertuang didalam pasal 10 permendagri nomer 1 tahun 2016 diantara kekayaan milik desa, yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan serta Belanja Desa, kekayaan desa dari hasil himbuan sejenis.

Desa akan selalu menjadi tujuan inisiatif pembangunan pemerintah. Akibatnya, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan

desa, antara lain tingkat produktivitas yang relatif rendah, ketiadaan infrastruktur sosial ekonomi, dan keberadaan desa yang jauh dari pusat pembangunan. Tingkat pendidikan, dan Tingkat opini publik masih cukup rendah. di dalam hal meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa serta membangun perekonomian masyarakat, maka UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang bagi desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk dikelola disebut Usaha Desa berupa kekayaan usaha lainnya demi kesejahteraan rakyat. (Febri, 2020)

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan potensi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa. sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah Nomor 23 tahun 2014. Di antaranya BUMDes mulai menggenjot pendapatan awal desa (PADes). BUMDes wajib berselisih dengan lembaga ekonomi agar BUMDes dapat menyediakan Kontribusi yang significant bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Namun di Desa mere kehe Kecamatan Kodi Bangedo Belum terlihat Secara Jelas tentang Badan Usaha Milik Desa, beberapa kajian menyebutkan bahwa selama ini program-program pembagunan yang ada belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik tentang **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mere kehe Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

1.2 Rumusan Masalah.

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini seperti yang telah diuraikan di atas:

- 1 Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mere Kehe Kecamatan Kodi Bagedo Kabupaten Sumba Barat Daya.?
- 2 Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mere kehe Kecamatan Kodi Bagedo Kabupaten Sumba Barat Daya.?

1.3 Tujuan Penelitian.

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- 1 Untuk mengetahui pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mere kehe Kecamatan Kodi Bagedo Kabupaten Sumba Barat Daya.
- 2 Untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang menghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mere Kehe Kecamatan Kodi Bagedo Kabupaten Sumba Barat Daya.

1.4 Manfaat Penelitian.

Ada manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini Yaitu sebagai berikut:

- 1 Manfaat akademik

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi dan Memperoleh gelar sarjana (Strata-1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

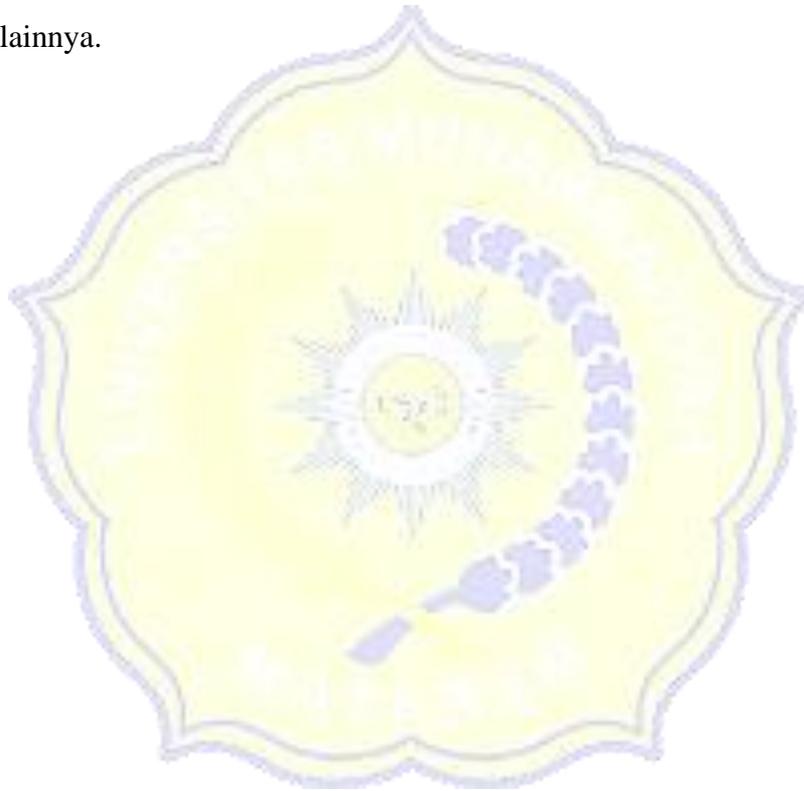
- 2 Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan

pengetahuan sosial dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya tentang strategi pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3 Manfaa Praktis

Penelitian selanjutnya tentang strategi pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dan pengetahuan sosial lainnya.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan dengan penelitian mengenai Strategi Pemerintah dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, di Desa Mere kehe Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya.

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	Peneliti/ tahun	Judul/Teori	Motode penelitian
1	Wahyu Sumarsono (2018)	Strategi Pendirian dan Pengelolaan BUMDES Amarta dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat di Pandowoharjo Sleman Yogyakarta. Teori Chandler dalam pemikiran Supriyono yang berpedapat bahwa strategi merupakan dasar penentuan pemberdayaan dan tujuan jangka panjang masyarakat serta pemakaian cara-cara bertindak dan alokasih sumber	metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil Menunjukkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan strategy pendirian dan pengelolaan BUMDes Amarta dengan tujuan penguatan ekonomi masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi dengan mengundang berbagai warga desa. Hal ini dilakukan dengan maksud mendorong desa membentuk BUMDes			

untuk mengelola dan mengembangkan aset yang dimiliki desa.

Persamaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi subyek baik penulis maupun penelitian sebelumnya. Adapun **Perbedaan** antara peneliti dengan penelitian terdahulu dimana, Wahyu Sumarsono Meneliti Tentang Strategi Pendirian dan Pengelolaan BUMDES Amarta dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat di Pandowoharjo Sleman Yogyakarta, dengan focus penelitiannya di Pandowoharjo Sleman Yogyakarta. Sedangkan penelitian penulis focus ke pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Mere Kehe Kecamatan Kodi Bengedo Kabupaten Sumba Barat Daya.

2	Dina Irawati DianaElvianita Martanti Tahun (2017).	Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” Teori menurut pendapat Martanti, 2017). Menyatakan bahwa ini dapat memwujudkan serta Aparatur desa ingin mengutamakan kebutuhan masyarakat dan masyarakat yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.	metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif
---	---	---	--

Hasil penelitian tersebut peraturan desa khususnya di desa Karangbendo dapat meningkatkan pengelolaan laporan keuangan desa berbasis kinerja, transparansi, akuntabilitas

Persamaan antara peneliti penulis dengan penelitian terdahulu diatas yaitu sama-sama meneliti tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDes) maupun menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian penulis dan penelitian terdahulu dimana, Dina Irawati meneliti tentang pengembangan potensi peran, serta pengelolaan sumberdaya desa melalui BUMDes didalam peningkatan pendapatan asli desa. Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. sedangkan peneliti penulis fokus kepengelolaan dadan usaha milik desa (BUMDes) Desa Mere kehe Kacamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya.

3	Ahmad Nur Ishan (2018)	Anlisis Pngelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) gerbang lentera sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep.	Metode Kualitatif
---	------------------------	---	-------------------

Hasil dari penelitiannya membahas tentan kesuksesan BUMDes gerbang lentera karna sumber daya yang baik, dari sumber daya alam, sumber daya manusia serta kemampuan desa yang lainnya. serta dukungan baik dari pemerintah desa pemerintah kabupaten, maupun provinsi hingga pemerintah pusat. dan partisipasi dari masyarakat yang tinggi.

Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu diatas yaitu sama-sama meneliti tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDes).

Perbedaan antara peneliti den peneletian terdahulu, dimana Ahmat Nur Ishan meneliti tentang penyidikan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di pintu masuk lampion sebagai supir desa wisata lerep sedangkan peneliti penulis fokus kepengelolaan bada usaha milik desa (BUMDes) Manghu Boko Desa Mera kehe Kecamatan Kodi Bangedo

Kabupaten Sumba Barat Daya.			
4	Irfan Nursetiawan (2018).	Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes. Teori pendapat Elsa (2014) mengatakan, bawasannya strategy yang tepat didalam pengembangan desa tertinggal yaitu meningkatkan sumber daya alam melalui intensifikasi pertanian.	metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif
<p>hasil penelitian mandiri berupa desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan mendapat bantuan pemerintah, namun ini hanya sebagai stimulus. meliputi kegiatan perencanaan pembangunan yang partisipatif, terbuka, akuntabel, dan terperinci untuk mewujudkan desa mandiri.</p> <p>Persamaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDes). Adapun Perbedaan antara peneliti dengan Irfan Nursetiawan mneliti Strategi Pembangunan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes Badan Usaha Milik Desa pada penelitian sebelumnya. Tujuannya untuk memaparkan strategi pencapaian tujuan pembangunan nasional berupa desa mandiri yang terganjal sejumlah persoalan. didalam perwujudan desa. dengan menderikan (BUMDes). sedangkan peneliti fokus kepengelolaan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Mere kehe Kecamatan Kodi Bagedo Kabupaten Sumba Barat Daya.</p>			
5	Rama dana, (2018).	Kebradaan Bdan Usaha Milik Desa (BUMDes) sbagai penguatan ekonomi Desa studi di desa Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang	Kualitatif

Hasil penelitiannya membahas keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Landung Sari sebagai sarana penguatan perekonomian desa melalui pembentukan, persebaran, dan penumbuhan usaha, serta memanfaatkan peran BUMDes sebagai sarana peningkatan dana untuk desa, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mengembangkan desa secara mandiri.

Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yang sebelumnya bekerjasama dalam kajian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu diatas dimana, Rama Dana meneliti Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai pembentengi perekonomian kota tinjauan di Kota Landung Sari, Daerah Dau, Rezim Malang”sedangkan peneliti penulis focus kePengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Mere Kehe Kecamatan Kodi Bengedo Kabupaten Sumba Barat Daya.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Definisi Manajemen

Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan adalah semua kegiatan yang sering dikaitkan dengan manajemen secara keseluruhan. Kata kerja “to manage,” yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur, adalah akar dari istilah manajemen. Manajemen adalah suatu proses, menurut sejumlah ahli, diartikan sebagai upaya metadis untuk menyelesaikan suatu tugas. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, prosedur ini terdiri dari serangkaian tindakan yang berjenjang, berkelanjutan, dan terkait.

(Wahyuni., 2016)

Sejumlah definisi manajemen yang berbeda dan dapat ditemukan dalam sejumlah karya sastra yang berbeda. Beberapa definisi tersebut antara lain manajemen sebagai proses kerjasama, manajemen sebagai sekumpulan orang dan melakukan kegiatan, manajemen juga sebagian seni serta ilmu. Manuallang, 1996 dalam (Effendi, 2014). prakteknya, manajemen dapat dipandang sebagai kegiatan yang digunakan manajemen puncak untuk mencapai tujuan melalui upaya orang lain.

manajemen adalah mengkoordinasikan aktivitas Dengan melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien, orang lain. Pengertian manajemen ini didasarkan pada mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sumber daya, yang menekankan pada bekerja sama atau mengkoordinasikan kegiatan kerja dalam melaksanakan tugas, Robbins dan Coulter dalam (Effendi, 2014) manajemen merupakan proses dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi di dinamis. Robbins Coulter menurut Kreitner (Effendi, 2014) manajemen suatu proses kerjaan Dalam lingkungan yang dinamis, berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. manajemen sumber daya manusia adalah ilmu sekaligus seni mengelola hubungan dan peran karyawan sehingga dapat bantu perusahaan, pengerja, maupun masyarakat untuk mencapai tujuannya.(Hasibuan, 2012)

2.2.2 Manajemen

Manajemen adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan orang lain. dari sekian

banyak langkah dalam suatu proses manajemen dan dilakukan untuk menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

John D. Millet (Sukarna, 2012), dalam bukunya *Manajemen in the Public Service*, manajemen adalah tindakan mengarahkan dan memfasilitasi kerja kelompok formal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tindakan mengarahkan dan memfasilitasi pekerjaan kelompok orang formal dan mencapai tujuan yang diinginkan maupun yang dikehendaki.

Pendapat Melayu S.P, (Hasibuan, 2012) Manajemen yaitu ilmu dan seni dalam mengelola proses penggunaan sumber manusia dan sumber daya lainnya efektif dan menguntungkan untuk mencapai tujuan tertentu. Senada dengan pendapat diatas,

Menurut (Handoko, n.d.) menyatakan bahwa manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasi, pengarahan, maupun mengawasi usaha anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, menurut (Siswanto.,2012) menyatakan bawasanya manajemen yaitu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasik, memotivasi, maupun mengendalikan arang dan mekanisme kerja supaya mencapai tujuan tertentu.

Manajemen berorientasi pada proses yang artinya manajemen memerlukan sumber modal manusia, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan agar aktivitas menjadi lebih efisien atau untuk menghasilkan tindakan yang berkontribusi pada pencapaian keberhasilan. maka karena

Akibatnya, tidak ada organisasi yang dapat mencapai kesuksesan tanpa menggunakan manajemen yang efektif. (Siswanto., 2012)

Berdasarkan pengertian tersebut maka manajemen menurut hemat penulis adalah ilmu tentang proses-proses pengelolaan dalam mencapai tujuan yang ditentukan dan mencapai hasil yang sesuai.

Malayu S.P Hasibuan (2012), mengklaim bahwa kata "managemen" berasal dari kata kerja "to manage", yang berarti "khusus" sebagai berikut.

1. mengatur yaitu semua unsur manajemen
2. Tujuannya mengaturnya supaya lebih efisien maupun keberhasilan mewujudkan tujuan.
3. mengatur agar bermanfaat secara optimal, terkoordinasi maupun terintegritasi dengan baik didalam mendukung terwujudnya tujuan organisasi.
4. Pimpinannya dan top management, middle manager, dan supervisor.
5. Untuk yang melaksanakan kegiatan secara berurutan dan untuk fungsi manajemen.

Manajemen yaitu proses mencapai hasil yang diinginkan Manajemen juga merupakan ilmu pengetahuan karena, Manajemen untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manajemen juga merupakan ilmu karena menggunakan kerangka ilmiah yang sistematis. Manajemen dapat digunakan semua organisasi manusia, termasuk bisnis, pemerintah, pendidikan, sosial, dan lembaga keagamaan lainnya.

2.2.3 Fungsi Manajemen Strategik

Menurut Siswanto, (2012) dalam bukunya mengatakan bawasanya,

manajemen strategis bertanggung jawab untuk mengendalikan proses yang panjang dan menunjuk serta menempatkan mereka yang terlibat. Oleh karena itu, manajemen Strategis yaitu seni dan ilmu yang mempersiapkan, menerapkan, maupun evaluasi putusan lintas fungsi dan memungkinkan suatu organisasi mencapai sasaran. Manajemen yang strategis adalah manajemen yang khusus di tingkat besar yang berhubungan dengan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan strategis. Mekanisme mengalokasikan sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan dan rencana untuk mencapai tujuan organisasi, membuat kebijakan dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, dan menetapkan tujuan organisasi adalah bagian dari manajemen strategis.

Pungsi manajemen strategis merupakan komponen mendasar dari prosedur pengelolaan yang selalu ada dan akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah empat divisi manajemen:

1. **Plening** adalah proses berpikir tentang apa yang perlu dilakukan dengan sumber daya yang tersedia dan menetapkan prioritas masa depan sehingga organisasi dapat beroperasi sesuai dengan tujuan fundamentalnya.
2. **(organisasi)**, khususnya tata cara penyiapan pembagian tenaga kerja ke dalam unit-unit kerja, tanggung jawabnya, dan penempatan individu yang tepat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.
3. **Pengarahkan** adalah proses memastikan bahwa semua anggota kelompok bekerja untuk mencapai tujuan sesuai dengan upaya organisasi dan perencanaan manajerial.

4. Mengevaluasi, adalah proses pemantauan serta mengendalikan kinerja organisasi untuk menjamin bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. dalam buku “Administrasi, Organisasi, dan Manajemen” sebagai referensi. (Sugiyono, 2017)

Menggambarkan sebagian dari kemampuan manajerial dalam organisasi sebagai berikut:

1. **Planning** adalah kegiatan perencanaan yang memerlukan pekerjaan administrasi, dimulai dengan perkumpulan data dan dilanjutkan dengan menyusun rencana.
2. Untuk mencapai tujuan organisasi, pengorganisasian adalah proses penyusunan yang mengembangkan berkomunikasi kerja di antara anggota organisasi.
3. **Directing (Pengarahan)**, adalah Pemberian instruksi atau perintah untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan merupakan kegiatan yang dikenal dengan directing. Fungsi penggerak (moving) yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan manajemen biasa juga disebut sebagai pengarahan. Kepemimpinan yang baik diperlukan untuk arah untuk berhasil. Jiwa kepemimpinan yang kuat mampu mengarahkan anggotanya secara efektif, berkolaborasi satu sama lain, dan mengkomunikasikan metode untuk memotivasi pesan.
4. Ada proses pengawasan dan pengendalian dalam evaluasi. Menurut Sondang, pengawasan yaitu proses pengamatan bagaimana keseluruhan kegiatan organisasi dilakukan untuk

memastikan bawasannya setiap tugas dilakukan sesuai dengan tujuan rencana yang telah ditetapkan. Tahap kontrol yang dibayangkan adalah pantauan serta pengecekan pimpinan dan melihat apakah hasilnya dicapai seperti yang diantisipasi. Perencanaan, pengorganisasian, tindakan, pengendalian, dan penganggaran adalah semua komponen manajemen. (Rehayu Relawan, 2012).

Adapun faktor yang diuraikan dalam penjelasan yang ada dalam manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan atau Planning.

Membangun komunikasi orang atau lebih dapat bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah beberapa pengertian yang berbeda dari perencanaan sebagai fungsi manajemen:

1. Memilih dan menetapkan tujuan organisasi serta penetapan kebijakan, prosedur, proyek, strategi, langkah, metode, dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
2. Pemilihan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pilihan tentang apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya
3. Penentuan pengetahuan sistematis yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengarahkan arus perubahan arah menuju tujuan yang telah ditetapkan.
4. Kegiatan perumusan dan penetapan keputusan adalah sarana yang dilakukan kegiatan persiapan, yang mana memuat langkah-langkah

untuk memecahkan masalah atau melaksanakan suatu pekerjaan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pengorganisasian atau Organizing

adalah suatu cara bagi sekelompok orang untuk bekerja sama yang melibatkan pembagian dan pendistribusian serta pekerjaan dan tugas serupa ke dalam satu unit kerja. Langkah selanjutnya adalah menetapkan wewenang dan tanggung jawab serta pengatur hubungan kerjasama, baik secara vertikal maupun horizontal.

3. Pelaksanaan (Actuating)

Implementasi dalam pelaksanaan telah direncanakan dalam menyelenggarakannya yang memiliki struktur organisasi yang meliputi ketersediaan personel sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk, pelaksanaan atau pergerakan dilakukan oleh organisasi.

4. Penganggaran atau Budgeting

Ini adalah salah satu aspek manajemen yang paling penting. karena pekerjaan ini berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan secara umum serta penerimaan, pencairan, penyimpanan, penggunaan, dan pertanggungjawaban. didalam lembaga sektor publik, kegiatan fungsi anggaran menekankan pada akuntabilitas serta menggunakan jumlah dana secara efisien serta efektif. Hal ini dikarenakan dana kelolaan merupakan dana publik yang telah diberikan kepada organisasi di sektor publik.

5. Pengawasan (Control)

Organisasi sektor publik berselalu menggunakan kontrol atau pengawasan. Manajer di sektor publik menjalankan peran ini untuk kerjaan dan dilakukan di unit atau unit kerjanya. Proses mengukur dan mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan fasilitas kerja dan kerja personel dalam mencapai tujuan organisasi inilah yang dimaksud dengan pengendalian. Kata kedua, sebaliknya, yaitu strategis serta dijamak dari bahasa Yunani *strategos* atau *strategieus*. Meskipun kata "*strategos*" berarti "jenderal", dalam bahasa Yunani kuno kata ini sering merujuk pada "pejabat negri" atau "pejabat negara" yang diharapkan melakukan peran yang lebih luas dan aktif. (Anwar, 2012)

Menurut pendapat lain, strategi diartikan sebagian kerangka kerja (framework), tehnik atau rencana yang spesifik dan khusus (Sugiyono 2012). Maupun dalam (Siagian, 2015a) menyoroti pentingnya kompetensi inti. Strategi tersebut didefinisikan sebagai: Prosedur adalah kegiatan yang stabil (terus berkembang) dan tanpa henti, dan diselesaikan dalam sudut pandang yang diantisipasi klien mulai sekarang. maka dari itu, strategis hampir selalu mulai dengan apa yang bisa terjadi daripada apa yang sebenarnya terjadi.

Teori mengacu pada dua karakteristik utama yang harus selalu diingat: peluang dan keterampilan, yang keduanya berkontribusi pada setiap situasi strategis. brinteraksi pada dua orang dan lebih merupakan situasi yang strategis. Dalam situasi strategis, tindakan setiap orang didasarkan dalam harapan menyangkut tindaknya

kepada orang lain dan tidak dapat dia kendalikan, pada hasilnya ditentukan oleh tindakan individu masing-masing aktor. (Siagian, 2015a) Ketika digabungkan menjadi satu unit, manajemen strategi adalah sebuah sistematis dan merumuskan, mewujudkan, dan memantau strategis, (Robbins, S & Coulter, 2017)

Strategi manajemen merujuk Proses manajerial untuk mengembangkan visi strategis, menetapkan tujuan, mengembangkan strategi untuk perwujudan dan mengimplementasikan strategis, pada kemudian, seiring waktu, membuat menyesuaikan dan dikoreksi terhadap visi, tujuan strategis, dan implementasi secara kolektif disebut sebagai manajemen strategis. Sedangkan (Siagian, 2015b) Berikut ini mendefinisikan manajemen strategis: sekumpulan putusan maupun tindakan mendasar dan diambil pada manajemen tingkat atas dan diterapkan semua tingkatan berorganisasi untuk mencapai tujuannya.

2.2.4 Faktor Keberhasilan Manajemen Strategik

Istilah manajemen strategis biasanya disebut sebagai seluruh ruang lingkup strategis kegiatan pengambilan putusan didalam suatu organisasi (Stahl and Grigsby, 2018). Dengan kata lain, manajemen strategis sebagai suatu proses berorganisasi didalam pembuatan kebijakan, didalamnya terdapat tiga kegiatan utama; yaitu formulasi strategis (formulation), implementasi (implementation) maupun mengevaluasi/kontrol.

Dalam teori manajemen strategis, beberapa indikator

digunakan untuk mengukurnya, antara lain; menyusun strategi, maksud dan, misi; serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, keinginan, yang terukur, fungsi sistem, kelompok, budaya, dan kebijakan diterapkan. dibagian lainnya yaitu kinerja lembaga, yang dievaluasi dan dikendalikan oleh manajemen strategis. Berikut penjelasan dari fungsi-fungsi tahapan. (Stahl and Grigsby, 2018)

Dibeberapa tindakan yang harus dilakukan selama tahap perumusan, salah satunya adalah menganalisis lingkungan beorganisasi. Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dapat digunakan untuk melakukan analisis. Penyusunan perencana strategi dapat meliputi pntentuan visi, misi, tujuan, and strategi merupakan langkah selanjutnya.

Organisasi dapat belajar dari kesalahan mereka dan menghasilkan strategi terbaik. Menyesuaikan tindakan yang diperlukan Bgitu juga dengan inplementasi merupakan tahapan yang krusial karena pada fase inilah seseorang pempinan berfungsi mengimplementasikan strategis yang telah disusun. Akibatnya, pemimpin yang sedang berlangsung harus dapat menggunakan struktur, sistem, dan budaya organisasi untuk meningkatkan motivasi. Menurut penjelasan Stahl dan Grigsby (2018), motivasi karyawan dan pimpinan termasuk dalam motivasi tahap implementasi. Pelatihan adalah salah satu cara untuk mendapatkan banyak motivasi. Selain itu, diperlukan dukungan struktural yang lebih disesuaikan dengan fungsi masing-masing divisi organisasi.

Dalam hal sanggaran, perosedur, sistim informasi, serta budaya organiasi, sistem yang ada juga harus dipertimbangkan selama tahap implementasi. Membuat kebijakan akan lebih sederhana diterapkan jika memperhatikan hal ini.

didalam peroses manajemen strategis yaitu pengevaluasi serta pengendalian, karena rencana yang telah dibuat dinilai pengakuannya di lapangan. Menurut Stahl dan Grigsby (2019) ada enam langkah dalam evaluasi dan pengendalian. Langkah-langkah yaitu: (a) memastikan apa yang dikendalikan, (b) menetapkan standar tersendiri, (c) memperoleh data, (d) menumbuhkan data pada standar, (e) mengumpulkan data dan, (f) melaksanakan tindakan.

Semakin jelas bawasannya perrubahan akan terjadi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, menuntut persiapan serta pelaksanaan kbijakan-kebijakan strategi serta menghadapi maupun menngantisipasi persoalan-persoalan yang sudah ada. Untuk mengubah dan mencapai ada tujuan yang lebih spesifik dan indikatif (terukur), diperlukan juga tindakan strategis. Setiap pembuat kebijakan harus menerapkan strategi manajemen yang tepat untuk mengelola semua ini.

termasuk semua unit kerja di pemerintahan dan bertanggung jawab atas ketentuan tertentu, serta yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Meningkatnya kualita pelayan publik dan menunjukkan bahwa Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari hal tersebut, terbukti dengan persepsi masyarakat bahwa kinerja pemerintah belum sepenuhnya maksimal.

Rachmat (2014) menyatakan didalam bukunya bawasan faktor penentu keberhasilan manajemen strategis antara lain:

1. Penerap Managemen Strategi

Berbagai faktor yang melatarbelakangi penerap manajemen strategis dalam organisasi pemerintahan Indonesia tidak dapat dipisahkan. Bidang bisnis dan organisasi, termasuk instansi pemerintah, menjadi tempat awal tumbuh dan berkembangnya manajemen strategis. Perluasan manajemen strategis lebih dari sekedar agen perubahan; sekarang menjadi persyaratan penting untuk implementasi tata kelola di Indonesia. Namun, penting untuk dipahami bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan, namun terdapat beberapa perbedaan antara penerapan manajemen strategis dalam bisnis (organisasi swasta) dan pemerintahan (organisasi nirlaba). Ini karena sifat organisasi.

2. Penerapan Manajemen Strategi

Berdasarkan perkembangannya sejarah, (Nawawi, 2017) menjelaskan bawasanya. manajemen strategis di lingkungan pemerintahan merupakan paradigma baru yang saat ini diterapkan di hampir semua organisasi. Berkaitan dengan nilai-nilai dalam organisasi,(Moore, 2015) secara khusus membahas bagaimana organisasi mengelola nilai dengan mempertimbangkan nilai lebih pada pencapaian misi daripada hanya kinerja keuangan, lingkungan yang mendukung, dan membangun legitimasi dan dukungan sebagai tujuan dan sarana. Moore menambahkan bahwa kinerja

keuangan dan ketahanan organisasi mengarah pada dan mendukung nilai bagi organisasi. Ini menghasilkan pendukung, legitimasi, kapasitas, operasional, untuk organisasi.

Manajemen strategis harus diterapkan dalam organisasi publik atau pemerintah karena adanya kebutuhan akan perubahan. Perpres No. 1 merupakan satu kebijakan pemerintah yang didapat dijadikan sebagai bukti berpentingnya manajemen strategis dalam pemerintahan. No 3 Tahun 2003, adalah tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Ini dapat digunakan sebagai contoh dunia nyata untuk memahami peran yang dimainkan manajemen strategis dalam mewujudkan tindakan pemerintah.

Keputusan Presiden disebutkan bawasannya pemerintah menggunakan strategi penerapan E-Government dalam rangka informasi dan transaksi publik yang berkualitas, efisien, dan efektif. Dalam hal ini, ada nilai-nilai yang tidak bisa ditentukan oleh strategi ini hal karena nilai-nilai beorganisasi, berfungsi berbagai bentuk pelayan dan bermutu, efisien, dan efektif.

3. Indikator Strategi

Perumusan misi, tujuan, dan strategi berupa beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur teori manajemen strategis. dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, motivasi, struktur, fungsi sistem, kelompok, budaya, dan kebijakan diterapkan. dibagian lain yaitu kinerja lembaga, dan dievaluasi dan

dikendalikan oleh manajemen strategis. Stahl dan Grigsby (2018) memberikan penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

Beberapa tujuan yang perlu dilakukan selama tahap perumusan, salah satunya adalah menganalisis lingkungan organisasi. Analisis SWOT dapat dimanfaatkan untuk memperoleh motivasi yang tinggi melalui pelatihan dalam rangka melakukan analisis. Selain itu, harus ada dukungan (kemungkinan, ancaman, kekuatan, dan kelemahan). Pengembangan rencana strategis, yang mencakup penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi, merupakan langkah selanjutnya. Organisasi dapat belajar dari pengalaman masa lalu untuk mengembangkan strategi yang tepat yang disesuaikan dengan lingkungan saat ini. Begitu pula dengan implementasi merupakan tahapan yang krusial karena pada fase inilah seorang pemimpin bertugas mengimplementasikan strategi yang telah disusun. Akibatnya, para pemimpin harus mampu menggunakan struktur organisasi, sistem, dan budaya untuk meningkatkan motivasi. Menurut penjelasan Stahl dan Grigsby (2019), motivasi karyawan dan pimpinan termasuk dalam motivasi tahap implementasi.

Dalam hal penganggaran, prosedur, sistem informasi, dan budaya organisasi, sistem yang ada juga harus dipertimbangkan selama tahap implementasi. Kebijakan yang dibuat akan lebih mudah diterapkan jika Anda memperhatikan hal ini. Evaluasi dan

kontrol adalah langkah terakhir dalam proses manajemen strategis karena rencana dievaluasi dalam hal seberapa baik mereka dilaksanakan di dunia nyata. Dalam evaluasi dan pengendalian, ada enam langkah menurut Stahl dan Grigsby (2018): dalam tahap evaluasi dan control terdapat 6 langkah sebagai berikut:

- (1) Menentukan hasil yang dikontrol,
- (2) Membuat perangkat yang Standar,
- (3) pengukuran hasil,
- (4) berbandingkan hasil yang standar,
- (5) Mencari cara Penyimpangan,
- (6) Melakukan Tindakan Kontrol.

2.2.5 Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan strategi penguatan ekonomi desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa (Yudiardi, 2015)

Pemerintah desa mendirikan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menggunakan sumber daya yang diminati pasar. Dalam BUMDes, pemerintah berperan sebagai fasilitator sedangkan masyarakat memegang kendali mekanisme operasional. Karena independen dari pemerintah desa, BUMDes dapat dengan leluasa mengembangkan pembangunan ekonomi desa, namun BUMDes juga menghadapi banyak tantangan.

BUMDes menghadapi berbagai permasalahan yang berbeda dengan

permasalahan desa secara keseluruhan dan dari strategi penanganannya. Banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berdiri, namun berbagai faktor menghambat kegiatan operasional setelah BUMDes berdiri. Akibatnya, setiap BUMDes harus memiliki strategi tersendiri agar kegiatan operasional tetap berjalan dan BUMDes dapat mengembangkan potensi desa. Untuk mencapai tujuan jangka panjang diperlukan strategi. Diperlukan suatu strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul bagi BUMDes. Untuk menggunakan strategi yang tepat dalam pengembangan BUMDes, strategi harus dievaluasi dari berbagai sudut pandang sesuai dengan ruang lingkup masalah yang perlu ditangani.

didalam upaya peningkatan perekonomian desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dan dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). BUMDes juga harus memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya karena merupakan salah satu lembaga ekonomi pedesaan. Hal ini agar keberadaan dan kinerja BUMDes benar-benar dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. juga untuk mencegah terbentuknya sistem bisnis kapitalis di pedesaan yang dapat merusak nilai-nilai masyarakat.

(Purnomo dalam Safitri, 2021) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dan tujuan utamanya adalah menawarkan pinjaman kepada individu yang membutuhkan modal untuk menjalankan bisnis. Selain itu, BUMDES dapat membantu individu dalam memulai usaha untuk meningkatkan perekonomian lokal. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah salah satu contoh tata kelola keuangan desa yang bermanfaat yang dilakukan secara berdaya guna, partisipatif, lugas, bertanggung jawab dan layak. Akibatnya, diperlukan upaya serius untuk memastikan bahwa manajemen bisnis ini berfungsi secara profesional, mandiri, dan efektif. bertujuan utama mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perkembangan ekonomi desa
 2. Menstabilkan pendapatan asli desa;
 3. Menstabilkan kreatifitas berpeluang produktivitas ekonomi massa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 4. mendorong pertumbuhan usaha bisnis informal. Berikut tujuan didirikannya BUMDes:
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber pendapatan desa.
 - b. Mengembangkan dan memperluas kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha desa.
 - c. Usaha di sektor informal yang semakin berkembang dan berkembang mampu menyerap tenaga kerja penduduk pedesaan.
 - d. Menstimulasi jiwa wirausaha warga desa berpenghasilan rendah.
- “BUMDes merupakan penunjang kegiatan ekonomi di desa yang

berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial (commercial Institutions),” demikian menurut Tim Kajian Dinamika Sistem Pusat Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, dalam bukunya yang berjudul Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan ikut memberikan pelayanan sosial, BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial di sisi masyarakat. Sedangkan sebagai pelaku usaha ingin menghasilkan uang dengan cara menjual barang dan jasa yang dibuat dari sumber daya lokal (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: 2007: 3) BUMDes dibedakan dengan ekonomi komersial kelembagaan secara umum dengan 9 (sembilan) ciri utama:

1. Badan usaha dimiliki desa dikelola secara bersama-sama.
2. Modal usaha bersumber dari agaran dana desa (50%) dan dari masyarakat (40%) melalui penyertaan modal (saham atau dari agaran);
3. menjalankan dengan berdasarkan kekeluargaan serta kegotongroyongan dan berakar dari nilai yang berkembang dari kehidup masyarakat local.
4. Mekanisme pembangunan desa secara menyeluruh dan informasi pasar yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakat menjadi landasan bagi bidang usaha yang dijalankan.
5. Adapun pengerja yaitu berasal dari dalam desa, BUMDes yaitu tenaga kerja yang berpotensi didesa.

6. Adapun keuntungan yang diperoleh adalah ditsranparakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau penyerta modal.
7. Musyawarah desa adalah tempat pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah.
8. Pedoman Usaha yang Diklaim oleh desa dijalankan sebagai pengaturan strategi usaha.
9. Memfasilitasi dari Pemerintah Desa.

Masyarakat harus menjadi sumber pemenuhan modal usaha BUMDes ini yang didirikan atas asas kemandirian dan prakarsa masyarakat. Namun Pinjaman modal dari sumber luar, seperti Pemerintah Desa, tersedia untuk BUMDes. bahkan melalui pihak ketiga, jika mereka mau. Hal ini sejalan dengan ayat 3 Pasal 213 UU 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pentingnya penjelasan ini untuk menyiapkan aspirasi BUMDes karena bentuknya akan bersinggungan dengan ketentuan Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Daerah (Perda)

UU Desa berimplikasi pada perluasan kewenangan desa. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk menopang kewenangan desa tumbuh berbanding lurus dengan pertumbuhan kewenangan iyalah. Istilah “Dana Desa” digunakan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah pusat dan daerah akan menyalurkan dana ke desa. Selain itu, desa dapat mengoptimalkan PADes, dan salah satu cara yang paling efisien untuk meningkatkan PADes adalah dengan membentuk BUMDes. Ada tiga alasan mengapa pendirian BUMDes sangat penting untuk pemekaran

desa:

1. Sebuah BUMDes sebagai usaha, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menggerakkan perekonomian desa, selain membebaskan biaya jasa kepada masyarakat. PADes berfungsi sebagai perpanjangan tangan BUMDes, untuk pembanguna desa.
2. BUMDes dapat menciptakan kegiatan ekonomi baru, menambah nilai, atau mensinergikan kegiatan ekonomi yang sudah ada yang sebelumnya dilakukan oleh penduduk desa, tetapi tidak boleh mengambil alih pekerjaan yang menyangkut ekonomi yang ada.
3. Di dalam BUMDes adalah Enterprise sosial yaitu jenis usaha yang didirikan untuk memecahkan masalah sosial dengan menciptakan nilai, mengelola aset dan potensi, serta menawarkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat.

Kesuksesan BUMDes tidak terjadi secara kebetulan. Namun desa tersebut tetap memiliki potensi selama masih ada masyarakatnya. bukan hanya anggota desa tertentu. Jika sebuah desa dapat menemukan peluang dan menggali potensinya, ia memiliki peluang untuk sukses dan sejahtera. Menurut Pasal 33 UUD 1945, keberadaan BUMDes merupakan tanda demokrasi ekonomi desa yang harus mencerminkan:

1. Menumbuhkan semangat gotong royong dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan
2. Mengelola sumber daya alam, air, dan tanah desa dengan
3. melestarikan demokrasi ekonomi di desa, untuk, dan oleh desa.

BUMDes didorong menjadi lembaga desa yang mampu mengelola.

seluruh aset dan potensi desa. Desa biasanya hanya berfungsi sebagai pengamat eksploitasi orang lain hingga saat ini. Oleh karena itu, desa tidak dapat memperoleh lebih dari kekayaan mereka. BUMDes harus bisa menghentikan kebiasaan tersebut. Benny dan Tetty (2020) menyatakan bahwa setiap orang didesa harus berbagi kekayaan.

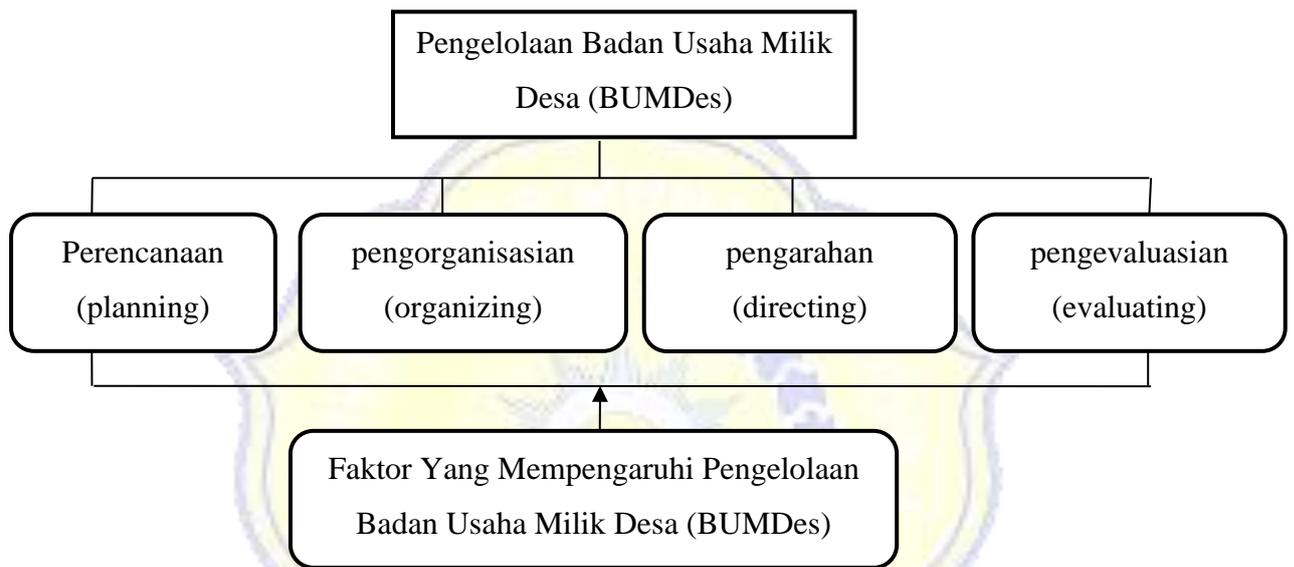
Alhasil, BUMDes sangat sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi desa. Fakta bahwa BUMDes berasal dari kehendak kolektif masyarakat menunjukkan bahwa pendahulunya adalah BUMDes. Meskipun demikian, BUMDes dikelola langsung oleh masyarakat desa, dan masyarakat merasakan langsung hasilnya (Benny dan Tetty, 2020).

Dua tujuan utama BUMDes adalah mendapatkan keuntungan materi dan membantu masyarakat desa. BUMDes menonjol dari bisnis lain berkat metode operasi yang efisien ini. Diharapkan BUMDes akan memberdayakan masyarakat desa selain menggali untuk keuntungan materi yang sebesar-besarnya. Tujuannya membantu masyarakat pedesaan secara sosial. karena modal sosial masyarakat desa merupakan komponen terbesar dari modal BUMDes (Benny dan Tetty, 2020).

2.3. Kerangka Pikir

Didalam penelitian dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mangho Boko Desa Mere kehe Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya, Yaitu kerangka pikir peneliti menggunakan tiori mengenai fungsi manajemen strategis.

Buku manajemen strategis oleh Rachmat (2014) berfungsi sebagai dasar untuk fungsi manajemen strategis. Ini menguraikan komponen mendasar dan melekat dengan proses manajemen dan berfungsi sebagai panduan pemerintahan didalam perencanaan terstruktur demi mencapai tujuannya. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, maupun pengevaluasian.



Sumber: yang di olah oleh penulis.2022

Gambar 2.4 kerangka piker

2.4. Pokus Penelitian

Berdasarkan Tujuan utama peneliti ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana strategi pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggunakan konsep fungsi manajemen strategis dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi sebagaimana diuraikan di atas.

2.5. Deskripsi Fokus

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka penelitian ini yang menjadi focus adalah

1. Perencanaan (planning), perencanaan didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menyusun rencana apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara melakukannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Desa Mere Kehe menetapkan tujuan untuk apa yang ingin dicapai.
2. Pengorganisasian mengatur pembagian kerja dan bagiannya masing-masing bagi pengelola agar bersinergi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh BUMDes Maghu Boko Desa Mere Kehe, berorganisasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mencari masyarakat yang mengelola BUMDes dengan baik.
3. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksud dengan “pengarahan” adalah pemberian bimbingan atau pengarahan serta pengawasan terhadap berjalannya usaha agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh BUMDes Manghu Boko Desa mere Kehe.
4. Pengevaluasian setiap hasil kerja dan kegiatan yang telah dilakukan merupakan evaluasi yang dimaksud dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini dilakukan agar pemerintah desa dapat mengetahui bahwa kegiatan pengelolaan BUMDes di Desa Mere Kehe berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

BAB III

METEDO PENELITIAN

3.1. Metode Peneletian.

Menurut Sugioyon (2012), pengertian metode adalah: metode penelitian yang pada hakikatnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan tertentu. Metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan adalah empat kata kunci yang harus dipertimbangkan berdasarkan hal ini.

Konsep tersebut memerlukan strategi penelitian yang sesuai untuk memfasilitasi diskusi yang memenuhi tujuan penelitian. yang diperoleh akurat dan lengkap. Oleh karena itu, metode yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi:

3.2. Jenis penelitian

Peneliti memiliki pengetahuan yang luas tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mere Kehe Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya di bidang ekonomi sesuai dengan rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan lebih didasarkan pada hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.

menggunakan metode kualitatif untuk mencocokkan realitas empiris dan tiori umum. Dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian dikenal dengan istilah “deskriptif kualitatif” yang menganalisis fenomena atau kondisi sosial dengan menggunakan data kualitatif yang telah diuraikan secara deskriptif. Untuk

mengetahui dampak BUMDES, kajian ini dapat mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu, untuk mengilustrasikan penyajian laporan, kutipan data akan disertakan dalam laporan penelitian.

3.3. Lokasi dan waktu Penelitian.

Kajian ini berlangsung selama satu bulan, terhitung sejak 1 Desember hingga 1 Januari 2023. Lokasi penelitian di Desa Mere Kehe, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Desa Mere Kehe merupakan salah satu desa di Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya yang memiliki banyak potensi namun tidak mampu memanfaatkannya.

3.4. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil obserwasi, wawancara, maupun dokumentasi oleh narasumber sebagai informan penelitian pada objek atau lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung . Data tersebut di olah serta di sajikan dan berbentuk narasi, dokumen, catatan, serta tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media arsip-arsip resmi, foto, rekaman video dan diagram. dan dapat mendukung kelengkapan data primer..

3.5. Teknik Penentua Informan.

Metode Penentua Informan Yang Di Gunakan Penulis Dalam

Peneletian Yaitu Menggunakan Purposive Sampling, Adalah Metode Pengambilan Sampel Yang Dipilih Secara Cermat dan Relevan Yang Tersruktur.S

Berikut informan yang dilibatkan dalam peneletian pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa mere kehe kecamatan kodi bagedo kabupaten sumba barat daya.

Tabel 3.1 teknik informan peneletian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
4	Pengurus Bumdes	6
5	Masyarakat	2
Total		9

3.6. Teknik Pengumpulan Data.

Proses pengumpulan data adalah proses yang dilakukan secara metodis dan baku untuk mendapatkan informasi, pernyataan, data, dan kepentingan penulis. Prosedur pengumpulan informasi yang digunakan dalam review adalah sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi adalah Tekhnik Metode pengumpulan data yang disebut observasi melibatkan melakukan pengamatan dan merekam keadaan atau perilaku objek sasaran. Pengamatan ini menghasilkan hasil sebagai berikut: aktivitas, kejadian, kejadian, objek, kondisi atau situasi tertentu, dan perasaan emosional seseorang (Sugiono 2016). Selama kegiatan pengelolaan BUMDes di Desa Mere Kehe penelitian ini menggunakan observasi untuk melakukan pengamatan secara langsung. Mereka demikian juga memupuk kebijaksanaan dengan cara mengamati suatu obyek yang dimiliki pada saat pengamatan. Peneliti akan bisa

mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang pelaku dan kejadian sebenarnya di Desa Mere Kehe dengan informasi ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode komunikasi antara dua orang di mana satu pihak mencari informasi dari pihak lain dengan mengajukan pertanyaan, seperti yang didefinisikan oleh tujuannya. (2016). Dengan mewawancarai peneliti untuk memperoleh keterangan atau informasi dan diperoleh. Dalam pelaksanaannya Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara tatap muka dengan informan. Ini mencari data yang komprehensif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dengan mempelajari catatan yang berkaitan dengan informasi pribadi pelapor. Peneliti juga memerlukan data untuk pencatatan temuannya menggunakan metode ini. Dari lembaga tersebut tertulis bahwa diperlukan profil kelembagaan, struktur organisasi, dan literatur lain yang dapat menyempurnakan data penelitian. (Sugiono, 2015).

3.7. Motode Analisis Data.

Proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara dan catatan lapangan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami disebut dengan analisis data. Dalam analisis data, Miles dan Huberman (1992) mengusulkan tiga tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data.

Merupakan data yang dikumpulkan di lapangan, kemudian diringkas,

diurutkan, dan dipusatkan pada aspek-aspek yang paling penting untuk memberikan gambaran yang lebih tepat dan memudahkan pengumpulan data.

2. Penyajian Data.

Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan sebagai kumpulan informasi terstruktur memungkinkan penarikan kesimpulan, digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus, dan berfungsi sebagai referensi untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan.

Penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis data disebut penarikan kesimpulan. Ujung diperkenalkan sebagai objek eksplorasi ekspresif mengingat.

3.8. Validasi data.

Temuan penelitian teknis yang diperlukan untuk memeriksa dan memvalidasi data sangat didukung oleh validasi data. Dalam penelitian ini, metode triangulasi data digunakan untuk memvalidasi data. Triangulasi, sebenarnya melihat keakuratan informasi yang akan dikumpulkan oleh sumber informasi yang melibatkan prosedur pengumpulan informasi yang berbeda serta pengecekan pada waktu yang berbeda adalah sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, observasi, atau beberapa subjek yang diduga memiliki sudut pandang yang berbeda.
2. triangulasi data berupaya menentukan kebenaran suatu informasi tertentu.